

Analysis of Local Government Financial Capability and Performance in Batang Hari Regency

Elva Clarissa Salsabila^{1*}, Iskandar Sam², Fitrini Mansur³
Universitas Jambi

Corresponding Author: Elva Clarissa Salsabila elvaclarissa17@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Financial Capability, Financial Performance, Regional Original Revenue (PAD)

Received : 20, January

Revised : 22, February

Accepted: 24, March

©2025 Salsabila, Sam, Mansur:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the ability and performance of regional finances in the implementation of regional autonomy in Batang Hari Regency. The method used is descriptive with a quantitative approach. The data analysis technique uses calculations of Batang Hari Regency financial data for the 2017-2023 fiscal year. The Financial Capability Index (IKK) reached 0.3956 and based on Permendagri Number 62 of 2017, the financial capacity of Batang Hari Regency is classified as moderate. The financial performance of the Batang Hari Regional Government based on the ratio of the degree of fiscal decentralization and the ratio of regional financial independence is in the very low category. The APBD effectiveness ratio of the Batang Hari Regency Government is in the less effective category. The regional financial efficiency ratio is in the inefficient category, with the regional expenditure compatibility ratio getting the result that the operating expenditure fund is greater than the capital expenditure.

Analisis Kemampuan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Batang Hari

Elva Clarissa Salsabila^{1*}, Iskandar Sam², Fitrini Mansur³
Universitas Jambi

Corresponding Author: Elva Clarissa Salsabila elvaclarissa17@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kemampuan Keuangan, Kinerja Keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Received : 20, Januari

Revised : 22, Februari

Accepted: 24, Maret

©2025 Salsabila, Sam, Mansur:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan dan kinerja keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Batang Hari. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan perhitungan terhadap data keuangan Kabupaten Batang Hari tahun anggaran 2017-2023. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) mencapai angka 0,3956 dan berdasarkan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, kemampuan keuangan Kabupaten Batang Hari tergolong sedang. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Batang Hari berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah masuk kategori sangat rendah. Rasio efektivitas APBD Pemerintah Kabupaten Batang Hari masuk kategori kurang efektif. Rasio efisiensi keuangan daerah masuk kategori tidak efisien, dengan rasio keserasian belanja daerah mendapatkan hasil bahwa dana belanja operasi lebih besar dibandingkan belanja modal.

PENDAHULUAN

Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk mengevaluasi dan mengawasi kinerja pemerintah daerah dan unit operasionalnya secara keseluruhan. Peran utamanya adalah menyampaikan data keuangan kepada para pemangku kepentingan yang mengandalkan informasi ini untuk menginformasikan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Setiap hak dan tanggung jawab khusus daerah yang berada di bawah lingkup pemerintah daerah merupakan keuangan daerah, seperti halnya semua bentuk kekayaan yang terkait dengan hak dan tanggung jawab daerah.

Pengelolaan keuangan daerah secara umum telah berubah secara signifikan sejak otonomi daerah disahkan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang sekarang seluruhnya berada di bawah kendali pemerintah daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam memajukan perekonomian daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah sudah menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk lebih mampu dalam memaksimalkan berbagai potensi yang dimiliki daerahnya. Sehingga permasalahan berangsur-angsur teratasi. Kebanyakan kota kecil di Indonesia masih belum cukup mandiri kinerja keuangannya.

Informasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017-2023 diperoleh dari Dinas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi APBD Kabupaten Batang Hari 2017-2023

Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
2017	1.172.121.770. 423	87.929.338.842	1.079.015.431.58 0	5.177.000.000
2018	1.199.729.789. 613	98.808.531.271	1.059.635.938.34 1	41.285.320.000
2019	1.320.716.450. 456	91.567.449.214	1.171.763.797.69 0	57.385.203.551
2020	1.197.376.863. 504	104.230.889.08 7	1.048.622.185.57 4	44.523.788.842
2021	1.344.302.737. 778	148.444.860.32 1	1.155.867.720.51 0	39.990.156.947
2022	1.266.293.731. 043	107.138.940.71 4	1.121.152.332.74 9	38.002.457.580
2023	1.430.157.907. 569	138.962.723.60 2	1.288.195.183.96 7	3.000.000.000

Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi 2017-2023 (data diolah, 2025)

Tabel 2. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari 2017-2023

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Daerah
2017	790.623.440.030	206.581.778.664	1.173.410.766.968
2018	824.201.188.995	148.206.782.170	1.163.494.102.231
2019	888.705.927.249	251.118.803.752	1.341.856.186.750
2020	825.871.344.855	150.464.273.242	1.196.945.496.533
2021	830.142.096.168	177.304.084.037	1.253.599.608.461
2022	845.410.945.967	276.394.144.255	1.323.260.025.201
2023	870.443.585.308	460.388.684.904	1.529.752.614.250

Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi 2017-2023 (data diolah, 2025)

Terbukti dari tahun 2017 hingga 2023 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari relatif kecil sebesar 8,7% dari keseluruhan Pendapatan Daerah kabupaten dengan PAD. Kuantitas bantuan pemerintah pusat khususnya dari subsidi daerah otonom dan anggaran pemerintah daerah, mencerminkan ketergantungan besar pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari pada subsidi pemerintah pusat. Kemampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah tergolong rendah, yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada masih kurang, serta adanya inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Dengan membandingkan rencana kerja dan bagaimana implementasinya, penilaian kinerja keuangan melayani kepentingan publik dengan mengevaluasi dan meningkatkan kinerja. Selanjutnya, mengevaluasi kinerja keuangan merupakan standar untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam kaitannya dengan keuangan pemerintah daerah di masa depan. Dengan adanya otonomi daerah, sistem pemerintahan di Kabupaten Batang Hari telah mengalami desentralisasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang mengawasi pelayanan publik, pembangunan, dan pengelolaan pemerintahan harus memberikan laporan akuntabilitas keuangan daerahnya.

Peneliti ingin melakukan meneliti secara menyeluruh untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan kinerja keuangan daerah Kabupaten Batang Hari berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Teori ini mengemukakan hubungan yang signifikan antara keberhasilan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka masyarakat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Dalam organisasi sektor publik, seperti entitas pemerintah, teori kepengurusan menemukan penerapannya, karena akuntansi sektor publik telah dirancang sejak awal untuk memenuhi kebutuhan informasi yang timbul dari hubungan antara pengurus dan prinsipal (Safitri et al., 2022). Melalui pengelolaan keuangan

daerah yang baik, akuntabel, transparan, dan terawasi guna memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan tujuan ekonomi. Pemerintah Daerah dapat menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk mengelola keuangan daerah secara efektif guna melaksanakan tugasnya, sehingga kepercayaan publik terhadap organisasi tersebut meningkat.

Keuangan Daerah

Dalam konteks penerapan hak dan kewajiban, keuangan daerah mencakup semua kekayaan dan barang yang mungkin dimiliki oleh daerah, serta semua hak dan kewajiban daerah yang dinilai dengan uang (Syam & Zulfikar, 2022). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan landasan khusus bagi penyelenggaraan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain pemberian keleluasaan dalam penyusunan produk regulasi. Hal tersebut dijabarkan sebagai berikut: 1) Peraturan daerah mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 2) Sistem dan tata cara pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah. 3) Masyarakat.

Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah adalah kapasitas keuangan daerah yang diukur dengan pendapatan daerah dikurangi dengan pengeluaran daerah. Menurut Bakar & Said (2021) pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. Pengeluaran daerah meliputi belanja pegawai aparatur sipil negara. Analisis kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan cara : 1) Indeks kemampuan keuangan (IKK), yaitu metode untuk mengetahui status kemampuan keuangan suatu daerah, seperti kabupaten atau kota. IKK membagi daerah menjadi tiga status kemampuan keuangan, yaitu IKK Tinggi, IKK Sedang, dan IKK Rendah. 2) Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, yang mengkategorikan kemampuan keuangan daerah menjadi 3 kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah.

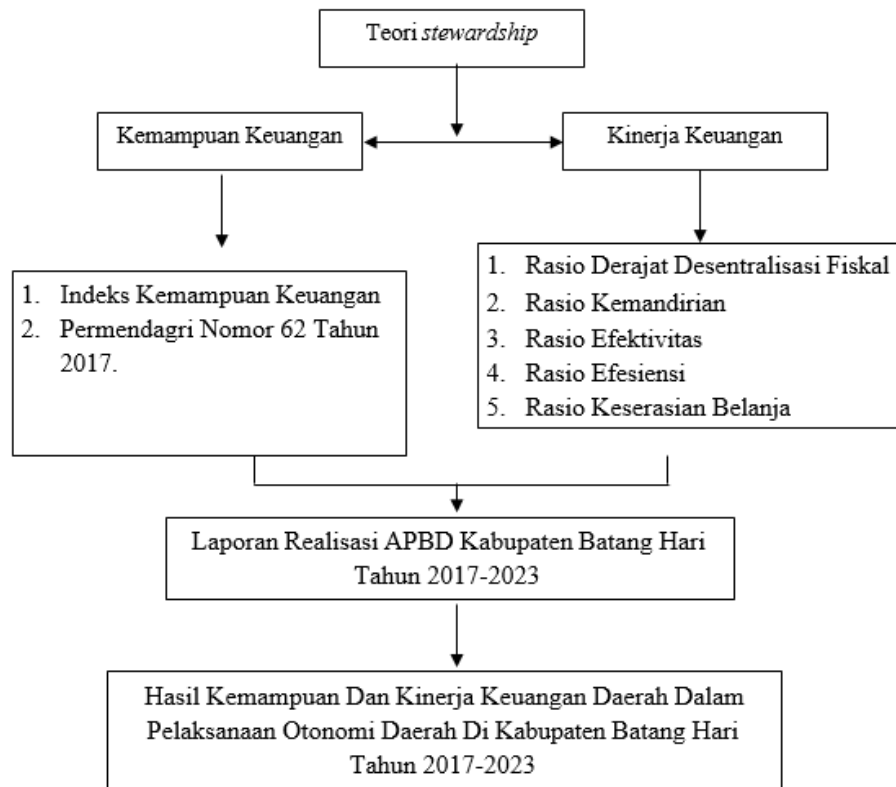
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kemampuan suatu daerah untuk mengeksplorasi dan mengelola sumber daya keuangannya sendiri untuk mendukung pelayanan masyarakat, operasional sistem pemerintahan, dan pembangunan daerah disebut sebagai kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini terjadi ketika suatu wilayah tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat dan memiliki kebebasan untuk menggunakan dana untuk kepentingan masyarakat lokalnya dalam parameter yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan (Palupi et al., 2022).

Kinerja keuangan daerah dapat diukur menggunakan beberapa rasio berikut ini:

1. Rasio tingkat desentralisasi fiskal ditentukan dengan membandingkan total penerimaan daerah dan besaran penerimaan asli daerah (PAD).
2. Jumlah penerimaan asli daerah dibagi dengan jumlah penerimaan daerah dari sumber lain (pendapatan transfer) menjadi dasar untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah.

3. Rasio efektivitas PAD, yang dihitung dengan membandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi aktual wilayah dengan realisasi PAD yang diinginkan.
4. Dengan membandingkan jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan dengan jumlah pendapatan aktual yang diperoleh, disebut rasio efisiensi keuangan daerah.
5. Rasio keserasian, yang menjelaskan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan kas mereka dengan baik antara belanja modal dan operasional.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian yaitu Dinas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang Hari dengan objek penelitian yaitu Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2023. Perhitungan data keuangan yang dikumpulkan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data untuk mengatasi masalah terkini sejalan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2021).

Berikut ini tolak ukur analisis data penelitian:

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah, Diukur Sebagai Berikut:

- a. Indeks Kemampuan Keuangan Daerah, perhitungan dan analisis kinerja Pendapatan Asli Daerah bisa dilakukan dengan mengukur indeks *share*, indeks *growth*, dan indeks *elasticity* (Vurry et al., 2018).

$$Share = \frac{PADt}{Total\ Belanja} \times 100\%$$

$$Growth = \frac{PADt - (PADt-1)}{PADt-1} \times 100\%$$

$$Elasticity = \frac{Growth\ PAD}{Growth\ PDRB} \times 100\%$$

Kemudian persamaan ini digunakan untuk menghitung Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKK):

$$IKK = \frac{Xs + Xg + Xe}{3}$$

- b. Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, untuk menentukan klasifikasi kemampuan keuangan daerah ditaksir berlandaskan jumlah Pendapatan Umum Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum) dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara (belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai).

Tabel 1. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Kemampuan Keuangan	Kriteria
> 550.000.000.000	Tinggi
300.000.000.000 - 550.000.000.000	Sedang
< 300.000.000.000	Rendah

(Sumber : Permendagri Nomor 62 Tahun 2017)

Analisis Kinerja Keuangan Daerah, Diukur dengan Rasio Berikut ini :

- a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

$$RDDE = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Tabel 2. Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat baik

(Sumber : Yulitiawati & Mustika, 2020)

b. Rasio Kemandirian

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 3. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

(Sumber : Yulitiawati & Mustika, 2020)

c. Rasio Efektivitas PAD

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4. Tingkat Efektivitas PAD

Efektivitas Pendapatan Daerah	Nilai
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	< 75%

(Sumber : Mahmudi, 2019)

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendaptan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Efisiensi	Kriteria Efisiensi
> 100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

(Sumber : Halim, 2007)

e. Rasio Keserasian

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari

1. Indeks Kemampuan Keuangan

a. Indeks *Share*

Tabel 6. Rasio Nilai Share Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Belanja Daerah	Nilai
2017	87.929.338.842	1.173.410.766.968	0,0749
2018	98.808.531.271	1.163.494.102.231	0,0849
2019	91.567.449.214	1.341.856.186.750	0,0682
2020	104.230.889.087	1.196.945.496.533	0,0871
2021	148.444.860.321	1.253.599.608.461	0,1184
2022	107.138.940.714	1.323.260.025.201	0,0810
2023	138.962.723.602	1.529.752.614.250	0,0908

(Sumber : Data diolah, 2025)

Tabel 7. Perhitungan Indeks Share Realisasi APBD Pemerintah Daerah Batang Hari Tahun 2017-2023

Tahun	Nilai-Kondisi Minimal	Kondisi Maksimal - Kondisi Minimal	Indeks
2017	0,0067	0,0502	0,1334
2018	0,0167	0,0502	0,3325
2019	-	0,0502	0,0000
2020	0,0188	0,0502	0,3755
2021	0,0502	0,0502	1,0000
2022	0,0127	0,0502	0,2536
2023	0,0226	0,0502	0,4504
Jumlah			2,5455

(Sumber : Data diolah, 2025)

$$X_s = \frac{\text{jumlah indeks}}{n} = \frac{2,5455}{7} = 0,3636$$

b. Indeks *Growth*

Tabel 8. Perhitungan Indeks Growth Realisasi APBD Pemerintah Daerah Batang Hari Tahun 2017-2023

Tahun	Realisasi PAD - Kondisi Minimal	Kondisi Maksimal - Kondisi Minimal	Indeks
2017	-	56.877.411.107	0,0000
2018	10.879.192.429	56.877.411.107	0,1913
2019	3.638.110.372	56.877.411.107	0,0640
2020	16.301.550.245	56.877.411.107	0,2866
2021	60.515.521.479	56.877.411.107	1,0640
2022	19.209.601.872	56.877.411.107	0,3377
2023	51.033.384.760	56.877.411.107	0,8973
Jumlah			2,8408

(Sumber : Data diolah, 2025)

$$X_g = \frac{\text{jumlah indeks}}{n} = \frac{2,8408}{7} = 0,4058$$

c. Indeks *Elasticity*

Tabel 9. Perhitungan Nilai Elasticity Realisasi APBD Pemerintah Daerah Batang Hari Tahun 2017-2023

Tahun	PAD	Total Belanja Langsung	Nilai
2017	87.929.338.842	206.581.778.664	0,4256
2018	98.808.531.271	148.206.782.170	0,6667
2019	91.567.449.214	251.118.803.752	0,3646
2020	104.230.889.087	150.464.273.242	0,6927
2021	148.444.860.321	177.304.084.037	0,8372
2022	107.138.940.714	276.394.144.255	0,3876
2023	138.962.723.602	460.388.684.904	0,3018

(Sumber : Data diolah, 2025)

Tabel 10. Perhitungan Indeks Elasticity Realisasi APBD Pemerintah Daerah Batang Hari Tahun 2017-2023

Tahun	Nilai - Kondisi Minimal	Kondisi Maksimal - Kondisi Minimal	Indeks
2017	0,1238	0,5354	0,2313
2018	0,3649	0,5354	0,6815
2019	0,0628	0,5354	0,1174
2020	0,3909	0,5354	0,7302
2021	0,5354	0,5354	1,0001
2022	0,0858	0,5354	0,1603
2023	-	0,5354	0,0001
Jumlah			2,9208

(Sumber : Data diolah, 2025)

$$Xe \frac{\text{jumlah indeks } 2,9208}{n} \frac{7}{7} = 0,4173$$

d. Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKKD)

$$IKK \frac{0,3636 + 0,4058 + 0,4173}{3} = 0,3956$$

Berdasarkan perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), Pemerintah Daerah di Kabupaten Batang Hari dalam pelaksanaan Otonomi Daerahnya pada periode Tahun 2017-2023 menunjukkan hasil skala indeks di angka 0,3956 yang masuk pada kategori sedang.

Permendagri Nomor 62 Tahun 2017

Tabel 11. Perhitungan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Batang Hari Tahun 2017-2023

Tahun	PAD	DBH	DAU	Belanja Pegawai	Kemampuan Keuangan
2017	87.929.338.8	93.704.230.3	605.739.42	506.919.796	280.453.198.3
	42	53	6.000	.817	78
2018	98.808.531.2	80.681.964.4	605.739.42	501.056.599	284.173.321.9
	71	17	6.000	.770	18
2019	91.567.449.2	82.258.988.5	627.388.77	491.787.622	309.427.591.2
	14	41	6.000	.492	63
2020	104.230.889.	61.203.955.6	569.633.51	463.365.001	271.703.358.7
	087	11	6.000	.933	65
2021	148.444.860.	209.989.489.	559.821.52	450.999.020	467.256.856.9
	321	118	8.000	.480	59
2022	107.138.940.	225.951.804.	558.692.58	460.558.076	431.225.256.6
	714	852	7.262	.213	15
2023	138.962.723.	268.764.929.	584.208.36	447.909.629	544.026.389.1
	602	665	4.873	.040	00
Mean					369.752.281.8 57

(Sumber : Data diolah, 2025)

Berdasarkan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari tergolong sedang karena berada diantara angka Rp. 300.000.000.000 - Rp. 550.000.000.000.

Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 12. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal APBD Pemerintah Daerah Batang Hari Tahun 2017-2023

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Kriteria
2017	87.929.338.842	1.172.121.770.423	7,5	Sangat Kurang
2018	98.808.531.271	1.199.729.789.613	8,2	Sangat Kurang
2019	91.567.449.214	1.320.716.450.456	7,0	Sangat Kurang
2020	104.230.889.087	1.197.376.863.504	8,7	Sangat Kurang
2021	148.444.860.321	1.344.302.737.778	11,0	Kurang
2022	107.138.940.714	1.266.293.731.043	8,4	Sangat Kurang
2023	138.962.723.602	1.430.157.907.569	9,7	Sangat Kurang
Mean			8,6	Sangat Kurang

(Sumber : Data diolah, 2025)

Rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari semasa periode tahun 2017-2023 ialah sebesar 8,6%. Sehingga disimpulkan bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari masuk pada kategori sangat kurang dalam menguasai tingkat desentralisasi fiskal.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 13. Rasio Kemandirian APBD Pemerintah Daerah Batang Hari Tahun 2017-2023

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian	Kriteria
2017	87.929.338.842	928.625.426.992	9,4	Rendah Sekali
2018	98.808.531.271	888.246.032.876	11,1	Rendah Sekali
2019	91.567.449.214	963.265.456.033	9,5	Rendah Sekali
2020	104.230.889.087	849.187.935.970	12,2	Rendah Sekali
2021	148.444.860.321	976.394.912.645	15,2	Rendah Sekali
2022	107.138.940.714	946.130.377.135	11,3	Rendah Sekali
2023	138.962.723.602	1.087.844.459.501	12,7	Rendah Sekali
Mean			11,6	Rendah Sekali

(Sumber : Data diolah, 2025)

Rata-rata rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari semasa 7 tahun anggaran ialah sebesar 11,6%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari tergolong sangat rendah pada pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah serta belum ideal dalam upaya mengeksplorasi potensi penerimaan daerah.

3. Rasio Efektivitas

Tabel 14. Rasio Efektivitas APBD Pemerintah Daerah Batang Hari Tahun 2017-2023

Tahun	Realisasi PAD	Target Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektivitas	Kriteria
2017	87.929.338.842	93.980.202.380,00	93,5	Cukup Efektif
2018	98.808.531.271	117.544.333.300,00	84	Kurang Efektif
2019	91.567.449.214	137.263.208.394,00	66,7	Tidak Efektif
2020	104.230.889.087	137.806.913.461,12	75,6	Kurang Efektif
2021	148.444.860.321	138.011.248.843,00	107,5	Sangat Efektif
2022	107.138.940.714	158.824.811.227,00	67,5	Tidak Efektif
2023	138.962.723.602	202.608.603.367,62	68,5	Tidak Efektif
Mean			80,5	Kurang Efektif

(Sumber : Data diolah, 2025)

Rata-rata rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari semasa 7 tahun periode anggaran sebanyak 80,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dalam upaya menunaikan urusan pemerintahan bisa dibilang masih kurang efektif.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tabel 15. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Batang Hari Tahun 2017-2023

Tahun	Total Belanja Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio Belanja	Kriteria
2017	1.173.410.766.968	1.172.121.770.423	100,1	Tidak Efisien
2018	1.163.494.102.231	1.199.729.789.613	96,9	Kurang Efisien
2019	1.341.856.186.750	1.320.716.450.456	101,6	Tidak Efisien
2020	1.196.945.496.533	1.197.376.863.504	99,9	Kurang Efisien
2021	1.253.599.608.461	1.344.302.737.778	93,2	Kurang Efisien
2022	1.323.260.025.201	1.266.293.731.043	104,5	Tidak Efisien
2023	1.529.752.614.250	1.430.157.907.569	106,9	Tidak Efisien
Mean			100,4	Tidak Efisien

(Sumber : Data diolah, 2025)

Rata-rata rasio efisiensi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari semasa 7 tahun periode anggaran sebesar 100,4% atau berada pada kategori tidak efisien. Ini menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Pemda masih perlu menekan pengeluaran belanja daerah agar dapat dikatakan efisien dalam penghematan anggaran.

5. Rasio Keserasian Belanja Daerah

Tabel 16. Rasio Belanja Operasi APBD Pemerintah Daerah Batang Hari Tahun 2017-2023

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja
2017	790.623.440.030	1.173.410.766.968	67,3
2018	824.201.188.995	1.163.494.102.231	70,8
2019	888.705.927.249	1.341.856.186.750	66,2
2020	825.871.344.855	1.196.945.496.533	68,9
2021	830.142.096.168	1.253.599.608.461	66,2
2022	845.410.945.967	1.323.260.025.201	63,8
2023	870.443.585.308	1.529.752.614.250	56,9
Mean			66

(Sumber : Data diolah, 2025)

Rata-rata rasio belanja operasi Kabupaten Batang Hari semasa 7 tahun periode anggaran berbilang 66%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang Hari termasuk kategori sedang untuk kebutuhan belanja operasi.

Tabel 17. Rasio Belanja Modal APBD Pemerintah Daerah Batang Hari Tahun 2017-2023

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja
2017	206.581.778.664	1.173.410.766.968	17,6
2018	148.206.782.170	1.163.494.102.231	12,7
2019	251.118.803.752	1.341.856.186.750	18,7
2020	150.464.273.242	1.196.945.496.533	12,5
2021	177.304.084.037	1.253.599.608.461	14,1
2022	276.394.144.255	1.323.260.025.201	20,8
2023	460.388.684.904	1.529.752.614.250	30
Mean			18,1

(Sumber : Data diolah, 2025)

Sedangkan rata-rata rasio belanja modal Kabupaten Batang Hari tahun 2017 hingga tahun 2023 relatif kecil hanya sebesar 18,1% dikarenakan sebagian besar dana yang dimiliki masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi.

PEMBAHASAN

Kemampuan Keuangan Daerah

a. Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKK)

Berdasarkan perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), Pemerintah Daerah di Kabupaten Batang Hari dalam pelaksanaan Otonomi Daerahnya pada periode Tahun 2017-2023 menunjukkan hasil skala indeks di angka 0,3956 yang berarti berada pada kategori sedang. Hasil tersebut diperoleh dari perhitungan skala indeks *share* yang berada pada angka 0,3636 yang dimana setiap tahunnya mengalami perubahan dan secara umum tidak adanya peningkatan indeks *share* dari tahun ke tahun berarti pemerintah mengandalkan penerimaan sumber dari luar bukan PAD sebagai sumber pembiayaan APBD sehingga menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam melaksanakan Otonomi Daerah, adapun perhitungan skala indeks *growth* berada pada angka 0,4058 dengan kondisi yang tidak stabil atau berubah-ubah di setiap tahunnya.

Perhitungan skala indeks *elasticity* berada pada angka 0,4173 dan dapat dilihat bahwa Kabupaten Batang Hari memiliki nilai rata-rata elastisitas di masing-masing setiap tahunnya yang tidak terlalu besar. Secara umum adanya perbedaan ini dikarenakan belanja modal lebih besar daripada PAD. Elastisitasnya juga terlihat berbeda dan indeks elastisitas menyatakan bahwa terjadi eskalasi pendayagunaan PAD dalam mendanai belanja modal. Pemerintah Daerah diharapkan tak kenal takut dalam membelanjakan PAD demi mendanai pembangunan fasilitas publik yang diimpikan dapat memupuk pertumbuhan dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah sehingga nantinya perolehan PAD kian melonjak pula.

b. Pemendagri Nomor 62 Tahun 2017

Berdasarkan perhitungan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, Pemerintah Daerah di Kabupaten Batang Hari dalam pelaksanaan Otonomi Daerahnya pada periode Tahun 2017-2018 menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari berada di kriteria rendah karena nilainya kurang dari Rp. 300.000.000.000. Kemudian pada tahun 2019-2020 kemampuan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari mengalami fluktuasi lalu meningkat kembali pada tahun 2021-2023 berada pada kriteria sedang.

Sehingga kemampuan keuangan Kabupaten Batang Hari periode Tahun 2017-2023 tergolong sedang dengan angka 369.752.281.857 atau diantara angka Rp. 300.000.000.000 - Rp. 550.000.000.000.

Kinerja Keuangan Daerah

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah di Kabupaten Batang Hari dalam pelaksanaan Otonomi Daerahnya pada periode Tahun 2017-2023 menunjukkan angka 8,6% masuk pada kategori sangat kurang atau sangat rendah. Situasi ini dipicu adanya kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah yang juga didukung dengan kenaikan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang merupakan salah satu pendapatan dengan kontribusi paling tinggi pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dapat diperinci bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dalam hal meninggikan Pendapatan Asli Daerah guna mendanai pembangunan masih berada pada angka yang sangat kurang. Dan dapat dinyatakan bahwa dana perimbangan memegang andil yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari. Alokasi dana perimbangan sampai saat ini masih mencerminkan sumber pembiayaan pendapatan yang menonjol dan merupakan sumber pembiayaan terhadap kebutuhan fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Batang Hari terutama untuk pelaksanaan pembangunan.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Daerah di Kabupaten Batang Hari dalam pelaksanaan Otonomi Daerahnya pada periode Tahun 2017-2023 menunjukkan adanya fluktuasi/naik turun pada rasio kemandirian setiap tahunnya. Rasio kemandirian Kabupaten Batang Hari pada tahun 2019 menyentuh angka 9,5%, pada tahun 2020 mengalami eskalasi di angka 12,2% serta pada tahun 2021 kembali mengalami eskalasi di angka 15,2% dan turun kembali menjadi 11,3% pada tahun 2022 serta pada tahun 2023 kembali mengalami eskalasi diangka 12,7%. Hal ini dikarenakan Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari tumbuh tidak konsisten dan cepat. Penerimaan pajak daerah, penerimaan pungutan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan asli daerah yang valid lainnya menjadi sumber PAD Kabupaten Batang Hari. Setiap tahunnya Pendapatan Pajak Daerah mengalami eskalasi, tetapi pendapatan retribusi daerah hanya mengalami eskalasi pada Tahun 2019 lalu menghadapi penurunan yang cukup substansial hingga Tahun 2022. Akan tetapi kontribusi pendapatan transfer dalam kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari masih berada diatas 50%.

Rata-rata rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari pada tahun 2017-2023 sebesar 11,6% yaitu masuk pada kategori sangat rendah. Situasi ini juga searah dengan rasio ketergantungan keuangan daerah yang sangat tinggi untuk menjalankan urusan pemerintahan, sehingga dapat dilihat bahwa peran kemandirian dan pelaksanaan otonom Pemerintah Daerah tidak dapat dicapai karena Pemerintah Pusat lebih menonjol ketimbang Pemerintah Daerah.

c. Rasio Efektivitas

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas, Pemerintah Daerah di Kabupaten Batang Hari dalam pelaksanaan Otonomi Daerahnya pada periode Tahun 2017-2023 menunjukkan kriteria kurang efektif di angka 80,5% dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya. Ini menyatakan bahwa Pemda Kabupaten Batang Hari dalam upaya mengaktualkan Pendapatan Asli Daerahnya masih kurang efektif atau belum mampu menyalurkan PAD dengan baik terlihat dari persentase yang kurang dari 100% setiap tahunnya.

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah di Kabupaten Batang Hari dalam pelaksanaan Otonomi Daerahnya pada periode Tahun 2017-2023 menunjukkan rata-rata angka 100,4% atau berada pada kategori tidak efisien, dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Sehingga Pemda masih perlu memangkas pengeluaran belanja daerah agar dapat dikatakan efisien dalam penghematan anggaran.

e. Rasio Keserasian Belanja Daerah

Berdasarkan perhitungan rasio keserasian belanja daerah, Pemerintah Daerah di Kabupaten Batang Hari dalam pelaksanaan Otonomi Daerahnya pada periode 2017-2023 menunjukkan bahwa belanja operasi di angka 66% sedangkan belanja modal berada pada angka 18,1%. Ini menunjukkan bahwa dana digunakan lebih melimpah untuk belanja operasi ketimbang belanja modal yang kecil atau belum terpenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari. Diharapkan kedepannya Pemda lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pada periode Tahun 2017-2023 diukur dengan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dicapai skala indeks sebesar 0,3956 adapun tergolong dalam kategori sedang dan berlandaskan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 diperoleh nilai terbilang Rp. 369.752.281.857 sehingga termasuk dalam kelompok sedang.
2. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pada periode Tahun 2017-2023 ditinjau dari rasio derajat desentralisasi fiskal berada pada angka 8,6% yang termasuk dalam kategori sangat rendah, dari rasio kemandirian berada pada angka 11,6% yang termasuk dalam kategori sangat rendah, adapun dari rasio efektivitas berada pada angka 80,5% sehingga termasuk dalam kategori kurang efektif. Kemudian dari rasio efisiensi menyiratkan angka 100,4% atau berada pada kategori tidak efisien. Sedangkan dari rasio keserasian belanja daerah menyiratkan angka 66% pada perhitungan belanja operasi dan angka 18,1% pada perhitungan belanja modal, sehingga Pemda Batang Hari lebih

condong memanfaatkan dana untuk kebutuhan belanja operasi ketimbang kebutuhan belanja modal.

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari harus dapat mengintensifkan penerimaan sumber pendapatan yang telah ada dengan memupuk dan memperluas pajak dan retribusi daerah demi meningkatkan bagian penerimaan sisi pajak dan retribusi daerah. Serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah agar PAD Kabupaten Batang Hari lebih konsisten dan tidak bertopang pada Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari diharapkan dapat menunjukkan kesiapan Pemerintah Daerah yang masih rendah, serta Kabupaten Batang Hari seharusnya lebih selektif dalam penggunaan belanja daerah terhadap belanja pegawai dan belanja barang akan mendominasi sebagian besar dari total belanja daerah.

PENELITIAN LANJUTAN

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa diaplikasikan sebagai sumber ide atau gagasan demi pengembangan penelitian yang akan datang. Selain itu, dalam hasil temuan penelitian ini bisa digunakan sebagai literatur bakal peneliti di masa mendatang untuk mengaplikasikan indikator-indikator di luar penelitian ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis berterimakasih kepada orangtua dan seluruh pihak yang mendukung penelitian ini, terutama kepada Bapak Iskandar Sam dan Ibu Fitriani Mansur yang telah membimbing penulis dengan sabar sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik. Peneliti juga berharap artikel ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, A., & Said, S. W. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 5, 1-20. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/13589>.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. STIM YKPN.
- Palupi, A. A., Hartiati, T., & Sofa, N. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Kemudahan Penggunaan Sistem Qris Terhadap Keputusan Bertransaksi Menggunakan Qris Pada UMKM. *Seminar Nasional Riset Terapan, Vol 10,1*, 1-9. <https://prosiding-old.pnj.ac.id/index.php/snrtb/article/view/5607>.
- Safitri, B. W., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Winarni, D. (2022). Pengaruh PAD, Belanja Modal, Ukuran Pemeritah, dan Perubahan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 401-409. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v5i2.695>.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98-114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>.